

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat judul tentang pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Oleh karena itu peneliti dalam kajian pustaka ini memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan referensi, diantaranya yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anis Widayati tahun 2020, yaitu sebuah skripsi yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PRUKADES Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES) di Desa Kebobang telah berhasil dalam menerapkan tahapan pemberdayaan yang tepat, mencakup perencanaan, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaan melibatkan musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, struktur organisasi, dan perekrutan anggota. Pendampingan difokuskan pada produksi dan pelatihan pembuatan pot. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota melalui hasil produksi, sementara tindak lanjut mendorong perkembangan keterampilan dan usaha mandiri masyarakat. Faktor keberhasilan program

ini mencakup antusiasme masyarakat, ketersediaan bahan baku, dan dukungan dari pemerintah Desa Kebobang. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya keterampilan masyarakat setempat dan ketidakpastian perubahan cuaca. Dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan, terutama bagi ibu-ibu yang sebelumnya memiliki penghasilan terbatas.

Kedua, penelitian jurnal pada tahun 2018, yang dilakukan oleh Dinar Wahyuni berjudul "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul*" dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran difokuskan pada tiga strategi utama: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa, hingga Desa Nglanggeran akhirnya diakui sebagai desa wisata. Pengkapasitasan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam manajemen desa wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran juga dibentuk untuk mengatur nilai-nilai dasar dan tata tertib melalui musyawarah. Tahap pemberdayaan diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki kapasitas untuk mandiri. Bantuan dalam pembangunan fasilitas wisata dan usaha wisata turut diterima oleh Desa Nglanggeran, dan akibatnya, perekonomian masyarakat setempat meningkat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dheo Rivaldy mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu

*“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisata untuk Pembangunan Desa Mandiri (Studi di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”*. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen terkait penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari berjalan baik dalam upaya mencapai pembangunan desa yang mandiri, meskipun belum mencapai hasil maksimal. Ada peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang menghambat kesuksesan program ini, seperti tingkat pendidikan rendah, keterbatasan dana, dan keterlibatan yang kurang dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program Desa Wisata. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desanya melalui program desa wisata di Desa Pujon Kidul, serta menganalisis bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program Desa Wisata dan melihat dampak dari adanya pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Istilah pemberdayaan ini berasal dari kata "daya" yang mengacu pada "kekuatan" dan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan adalah proses yang melibatkan memberikan kemampuan atau kekuatan kepada kelompok yang kurang berdaya atau belum memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan (Hamid, 2018).

Pemberdayaan menurut (Mc Ardle, dikutip dalam Harry Hikmat) adalah proses di mana individu secara konsisten membuat keputusan dan memastikan pelaksanaannya. Ketika mencapai tujuan bersama, individu diberdayakan melalui kemandirian, merasa bertanggung jawab untuk terus meningkatkan diri dengan usaha sendiri, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Semua ini bertujuan mencapai target tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pihak eksternal (Lendriyono et al., 2021).

Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment merujuk pada kata "Power" (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, konsep dasar dari pemberdayaan berhubungan erat dengan gagasan tentang kekuasaan, seperti yang diungkapkan oleh Suharto (2009). Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk mengarahkan tindakan orang lain sesuai dengan keinginan pribadi,

tanpa memperhatikan keinginan dan minat mereka. Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan individu atau kelompok yang rentan dan lemah untuk: 1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat merasakan kebebasan, bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit. 2. Mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang serta jasa yang diperlukan. 3. Terlibat dalam proses pembangunan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka (Suharto, 2009 ; Abidin, 2013).

Pentingnya komunitas atau komunitas lokal sangat terlihat dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya serta sektor pariwisata. Murphy (1988) menggambarkan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini sebagai "kegiatan berbasis komunitas," di mana kegiatan budaya dan pariwisata berkembang. Fokusnya adalah pada nilai sumber daya lokal dan karakteristik unik komunitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti norma, adat istiadat, dan tradisi. Pada saat yang sama, dalam komunitas yang berdekatan dengan destinasi pariwisata, diakui bahwa objek tersebut menjadi bagian integral dari sistem ekologi yang terkait erat dengan budaya dan sumber daya pariwisata (Fuadiputra et al., 2022).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu klien atau suatu komunitas agar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan

bertindak secara mandiri terhadap kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan mengurangi dampak dari hambatan-hambatan sosial atau pribadi yang ada, sehingga mereka dapat menggunakan kekuasaan yang dimiliki, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat keyakinan diri mereka dalam mengelola kekuasaan tersebut. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan transfer kekuasaan kepada individu atau kelompok yang lebih lemah agar mereka juga dapat memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam pekerjaan sosial baik dalam praktik maupun tujuan-tujuan lainnya (Payne, 2016).

Pemberdayaan adalah konsep yang berasal dari perkembangan pemikiran dan budaya Barat, terutama Eropa, yang muncul pada tahun 1970-an dan terus berkembang sejak itu. Pada akhir dekade 1960-an, para pakar mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada tujuan pembangunan lainnya, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Terdapat negara-negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan, dan Afrika Selatan, di mana, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, masalah-masalah terkait perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan muncul, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan dampak yang diharapkan.

Permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat menyebabkan perbedaan pandangan yang mendasar. Perbedaan ini disebabkan oleh paradigma atau perspektif yang memiliki pengaruh signifikan pada teori-teori yang digunakan untuk menganalisis realitas sosial. Teori ini memiliki empat fungsi utama: menjelaskan fenomena, meramalkan hasil yang mungkin terjadi, mengendalikan perubahan, dan mengelola perubahan dalam aktivitas masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, praktek ini mencakup keempat fungsi berikut: memberikan gambaran tentang kondisi, mengidentifikasi akar permasalahan, melakukan prediksi hasil tindakan, dan berupaya mengelola serta mengendalikan perubahan pada berbagai tingkat aktivitas masyarakat.

Adams (dalam Widayanti, 2012) menjelaskan, Pemberdayaan adalah upaya yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan mereka dan mencapai tujuan mereka. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan mereka bekerja secara mandiri serta memberikan dukungan kepada diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pemberdayaan dapat dilihat dari beberapa definisi diatas merupakan proses atau cara untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi masyarakat agar dapat meningkatkan kemandiriannya dari potensi-potensi yang ada secara berkelanjutan dan dapat merubah kehidupan masyarakat lebih baik.

## 2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat, menurut Kamarudin dan Siti Hajar (1998), dapat dijelaskan sebagai sekelompok manusia yang tinggal bersama dalam suatu lokasi tertentu dan mengikuti norma-norma serta aturan yang berlaku. Ini mencakup cara hidup bersama dan interaksi sosial yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam konteks masyarakat, terdapat norma dan nilai bersama yang mencakup aspek baik dan buruk (Hasmori et al., 2011).

Selain itu menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*society*" berasal dari kata Latin "*socius*," yang artinya kawan. Dalam bahasa Arab, istilah "*syaraka*" mengandung makna "ikut serta" dan "berpartisipasi." Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Karl Marx, di sisi lain, mengartikan masyarakat sebagai struktur yang mengalami ketegangan organisasi dan perkembangan karena terdapat pertentangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang kemudian terpecah. Terdapat beberapa unsur penting dalam konsep masyarakat:

1. Terdapat sekelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Kehidupan bersama ini bukan insidental atau spontan, melainkan untuk keberlangsungan jangka panjang.
2. Terdapat kesadaran di kalangan anggota masyarakat tentang kesatuan mereka, yang tercermin dalam solidaritas dan budaya bersama yang menghubungkan mereka satu sama lain.



Berdasarkan beberapa definisi diatas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal bersama, berinteraksi, dan menjalin hubungan sosial berdasarkan kesamaan budaya, identitas, lokasi geografis, dan warisan tradisional. Hal ini menciptakan ikatan kesamaan yang menggabungkan mereka dalam suatu sistem sosial.

### **3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah tindakan sosial di mana sebuah kelompok penduduk atau komunitas merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial mereka dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada (Gunawan, 2009). Adapun menurut Sunartiningsih (2004) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri agar mereka dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan secara independen. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kemampuan lembaga masyarakat agar dapat mengelola diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan di masa depan (Oman, 2010).

Robert Chambers (dalam Alfitri, 2011) berpendapat bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep dalam konteks pembangunan ekonomi yang mencakup aspek sosial. Pendekatan ini

mengedepankan aspek manusiawi, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar atau upaya mengurangi kemiskinan, konsep ini menyediakan alternatif terhadap pandangan pertumbuhan yang lebih konvensional (Hamid, 2018). Sedangkan berdasarkan Surjono & Nugroho, pemberdayaan masyarakat adalah proses yang mendorong masyarakat, terutama yang mengalami keterbatasan akses terhadap pembangunan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat berarti proses membangun manusia agar dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang dan meningkatkan kemandirian masyarakat yang diberdayakan untuk dapat merubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik dan terus berkelanjutan dikedepannya.

#### **4. Tahap -Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sulistyani (2004) bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Tahap Penyadaran: Ini melibatkan sosialisasi dan komunikasi untuk mengenalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan memberikan arahan. Tujuannya adalah membuat masyarakat menyadari potensi tersebut.
2. Tahap Transformasi: Pada tahap ini, upaya dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mereka menjadi lebih sadar

dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau kunjungan ke desa wisata yang telah sukses.

3. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual: Hasil dari pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memberikan motivasi dan menghasilkan inovasi yang mendukung pengembangan desa wisata (Wahyuningsih, 2013).

Dalam tahap pertama, yakni tahap penyadaran, tindakan ini dapat dilaksanakan melalui sosialisasi yang dijalankan oleh pelaku pemberdaya dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat yang akan diberdayakan untuk membuka pikiran dan potensi-potensi yang ada didalam masyarakat dan membangkitkan rasa semangat untuk meningkatkan kemampuan dirinya tentang perlunya memperbaiki kondisi kehidupannya untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Tahap kedua yaitu tahap tranformasi dalam tahap ini masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan dengan sesuai kebutuhan dasar masyarakat dan untuk dapat berpartisipasi dengan baik dengan kemauan dan semangat untuk belajar dalam proses pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap ketiga yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual dimana tahap ini bertujuan agar masyarakat dapat membentuk kemandirian melalui wawasan-wawasan intelektual yang

menciptakan kreasi dan inovasi-inovasi dari potensi yang ada disekitar lingkungannya. Dalam tahap ini peran pemerintah diperlukan untuk menjadi fasilitator dalam proses pemberdayaan tersebut.

## **5. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal secara umum meliputi pelatihan, musyawarah dalam perencanaan program dan kegiatan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Pearse & Stiefel (1979) memperluas perspektif pemberdayaan dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk berikut:

- a. Menghormati Kebhinekaan: Pentingnya menghormati perbedaan dan kebhinekaan dalam masyarakat majemuk sebagai bentuk pemberdayaan mendasar.
- b. Menghormati Ciri Khas Lokal: Memahami dan menghargai kearifan lokal serta pengetahuan lokal sebagai bagian dari pemberdayaan.
- c. Dekonsentrasi Kekuatan: Penyerahan kewenangan dari pihak atau institusi yang memiliki wewenang kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat.
- d. Peningkatan Kemandirian: Upaya untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri individu atau masyarakat.
- e. Peningkatan Ruang Interaksi: Memberikan ruang bagi diskusi dan penyampaian gagasan serta aspirasi masyarakat kepada lembaga

atau institusi yang memiliki otoritas dalam kegiatan yang dilaksanakan.

- f. Penyediaan Akses: Menciptakan akses dan ruang interaksi yang lebih luas bagi masyarakat, yang juga merupakan media untuk memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat (Ramazan, 2011).

## **6. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan penguatan kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang lemah, yaitu yang tidak memiliki akses dan tidak berdaya, baik disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Ada beberapa masyarakat atau kelompok yang dapat disebut masyarakat atau kelompok lemah, yaitu seperti; 1) Kondisi lemah secara struktural mengacu pada ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam masyarakat, serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. 2) Lemah secara spesifik merujuk pada kelompok-kelompok tertentu seperti lansia, anak-anak, remaja, individu dengan cacat, komunitas LGBT, dan masyarakat yang terpinggirkan. 3) Kelemahan personal mencakup situasi di mana individu mengalami masalah pribadi atau konflik dalam lingkungan keluarga mereka (Suharto, 2010).

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012), pemberdayaan memiliki tujuan yang mencakup beragam usaha untuk perbaikan, sebagai berikut;

1. Perbaiki pendidikan (*better academy*) yang baik merujuk pada pemberdayaan dalam konteks pendidikan yang lebih baik. Ini tidak hanya mencakup peningkatan materi dan metode, tetapi juga perubahan dalam aspek waktu, lokasi, serta hubungan antara fasilitator dan peserta. Tujuannya adalah untuk merangsang semangat dan motivasi belajar dalam pendidikan non-formal selama proses pemberdayaan.
2. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*) mengacu pada harapan bahwa pemberdayaan akan meningkatkan aksesibilitas, terutama terkait dengan sumber informasi, sumber keuangan, penyedia produk, peralatan, dan institusi pemasaran.
3. Perbaiki tindakan (*better action*) berarti meningkatkan pendidikan dan aksesibilitas melalui berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang lebih baik.
4. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) yaitu, dengan memperbaiki kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang dilakukan agar dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan jejaring dan kemitraan-usaha, yang dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
5. Perbaiki usaha (*better business*) yaitu tujuan-tujuan di atas seperti perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas,

kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat merubah atau memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan lebih baik.

6. Perbaikan pendapatan (*better incom*) merujuk pada upaya meningkatkan bisnis atau usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dalam keluarga dan komunitas.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan dapat menyumbang pada perbaikan kondisi lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial. Kerusakan lingkungan sering kali berhubungan dengan isu-isu kemiskinan atau pendapatan rendah dalam komunitas.
8. Perbaikan kehidupan (*better living*) mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat, bersama dengan peningkatan pendapatan dan lingkungan yang baik, dapat menghasilkan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
9. Perbaikan masyarakat (*better community*) berarti bahwa dengan kondisi kehidupan yang lebih baik dan dukungan lingkungan yang baik, masyarakat dapat mengembangkan sebuah komunitas yang lebih baik.

## **7. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Aswas (2014), dalam pemberdayaan masyarakat, terutama yang ditujukan kepada komunitas, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan:

1. Pemberdayaan harus berlangsung secara demokratis dan sukarela, tanpa adanya tekanan, karena tiap kelompok dalam masyarakat memiliki masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, serta hak yang sama untuk diberdayakan.
2. Kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi kelompok sasaran yang dilakukan pada tahap awal.
3. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pemberdayaan, dan menjadi dasar bagi penetapan tujuan, pendekatan, dan jenis kegiatan yang diterapkan.
4. Keberlanjutan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, seperti gotong royong, harus dijaga karena memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.
5. Pemberdayaan harus bersifat bertahap dan berkelanjutan, sebagai proses yang memerlukan waktu, dari yang sederhana hingga yang kompleks.
6. Keragaman karakter, budaya, dan tradisi masyarakat harus mendapat perhatian.
7. Seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi, harus menjadi fokus dalam upaya pemberdayaan.
8. Diskriminasi, terutama terhadap perempuan, harus dihindari.



9. Partisipasi dalam pengambilan keputusan harus berlangsung secara inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan waktu, materi, metode kegiatan, dan sebagainya.
10. Partisipasi masyarakat harus muncul dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik.
11. Agen pemberdayaan harus berperan sebagai fasilitator yang kompeten, yang bekerjasama dengan semua pihak, institusi, LSM, dan lembaga masyarakat terkait (Hamid, 2018).

### **C. Konsep Pariwisata**

Menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Indonesia, pariwisata merujuk pada beragam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata mencakup semua tindakan pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat dalam mengatur, mengelola, dan memenuhi kebutuhan para wisatawan.

Menurut Soekadijo (2001) menyatakan bahwa Pariwisata adalah semua aktivitas yang terkait dengan wisatawan dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembangunan hotel, pelestarian situs budaya, pembuatan fasilitas rekreasi, penyelenggaraan acara pariwisata, penyediaan transportasi, dan lain sebagainya. Semua kegiatan ini dapat disebut sebagai bagian dari sektor pariwisata, dengan harapan bahwa hal-hal ini akan menarik kedatangan para wisatawan (Mulyati et al., 2018).

Menurut Damanik (2005) Pariwisata memiliki potensi besar sebagai alat yang praktis dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pendekatan pariwisata berorientasi pada masyarakat dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat kurang mampu untuk ikut serta dalam manfaat dan kemajuan sektor pariwisata (Oman, 2010).

#### **D. Desa Wisata**

##### **1. Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan komunitas setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bender, 2016).

Desa merupakan suatu wilayah yang didalamnya terdapat komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan dan mempunyai rasa kesatuan yang sama dalam waktu yang cukup lama dengan dibatasi wilayah kewenangannya. Dengan adanya peraturan-peraturan yang diatur untuk kepentingan masyarakat didalamnya berdasarkan hak-hak yang dimilikinya.

## 2. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merujuk pada sebuah wilayah yang menawarkan pengalaman pedesaan secara komprehensif, yang memungkinkan pengunjung merasakan esensi kehidupan desa dalam hal sosial, budaya, tradisi, arsitektur, struktur sosial, dan kekayaan alamnya. Ini disajikan melalui pendekatan yang mengintegrasikan elemen-elemen pariwisata, termasuk makanan khas, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Desa Wisata juga merujuk pada area tertentu yang berhubungan dengan berbagai aspek kearifan lokal, seperti adat-istiadat, budaya, dan potensi alam. Semua elemen ini dikelola dan dijadikan daya tarik wisata sesuai dengan kemampuan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kearifan lokal atau pengetahuan lokal ini adalah pengetahuan khusus yang dimiliki oleh suatu komunitas atau budaya, yang telah tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun melalui interaksi dengan lingkungannya.

Selain itu, Desa Wisata merupakan destinasi wisata yang menggabungkan berbagai daya tarik, fasilitas umum, infrastruktur pariwisata, dan aksesibilitas dalam konteks kehidupan masyarakat yang berakar pada adat dan tradisi lokal. Desa wisata juga menitikberatkan pada tema produk pariwisata tertentu, seperti desa industri, desa kerajinan, desa kreatif, atau desa keramik. Sementara itu, wisata desa adalah kunjungan wisata yang memilih desa sebagai tujuan, tanpa

persyaratan khusus terkait dengan sumber daya desa tersebut (Nuryanti, 2015).

Dari pengertian diatas peneliti mengartikan desa wisata merupakan suatu pengembangan dari sebuah desa yang memiliki potensi-potensi untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik dalam meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan sosial.

### **3. Kategori Desa Wisata**

Desa wisata dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu:

1. Desa Wisata Embrio; Desa yang memiliki potensi pariwisata yang bisa menjadi desa wisata, dan telah ada inisiatif awal dari masyarakat atau desa untuk mengelolanya sebagai tujuan wisata.
2. Desa Wisata yang Sedang Berkembang: Desa yang telah mengelola potensi wisata dengan bantuan swadaya masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Mereka telah memulai upaya promosi dan berhasil menarik minat para wisatawan untuk datang.
3. Desa Wisata yang Maju: Desa wisata yang telah mencapai tingkat kemajuan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang stabil. Pengelolaannya dilakukan secara profesional oleh forum pengelola

seperti koperasi atau BUMDES. Promosi dan pemasaran dilakukan dengan baik.

Untuk memenuhi kriteria sebagai desa wisata, beberapa syarat pokok harus dipenuhi:

- a. Harus memenuhi persyaratan sebagai tujuan pariwisata sesuai dengan regulasi UU No. 10 tahun 2009
- b. Aktivitas pariwisata harus berfokus pada sumber daya desa
- c. Wisatawan harus aktif terlibat dalam kehidupan desa
- d. Lebih menitikberatkan pada kegiatan rekreasi di luar ruangan
- e. Maksimal memanfaatkan sumber daya manusia setempat
- f. Tetap memperhatikan dan menghormati budaya serta pengetahuan local
- g. Menyediakan akses yang memadai baik ke destinasi lain maupun di dalam desa wisata itu sendiri
- h. Memiliki komunitas yang peduli terhadap pariwisata.